

# Pedoman Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PALANGKA RAYA

**KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mendukung pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Bappedalitbang Kota Palangka Raya terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP, salah satunya dengan membuat pedoman pengukuran kinerja di lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

Panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas dalam melakukan pengukuran kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja Bappedalitbang dapat lebih meningkat di tahun berikutnya.

Palangka Raya, 22 Januari 2024



Kepala Badan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Kota Palangka Raya,



**Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750317 199903 1 005

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada komponen Pengukuran Kinerja dengan bobot 30% yang dinilai/dievaluasi meliputi :

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan;
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment* serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja harus didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektivitas dan efisiensi pencapaian *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Standar baku tersebut mencakup teknis dan metode pengukuran kinerja, cara pengukuran dan waktu pengukuran serta sumber data yang akurat, dengan memanfaatkan instrument berbasis sistem elektronik.

Hasil dari pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi unit kerja.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari panduan pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dokumen AKIP Bappedalitbang Kota Palangka Raya;
2. Pembangunan sistem pengukuran kinerja di Lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya;
3. Sebagai panduan/pedoman unit kerja di Lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya dalam rangka pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja secara berkala;
4. Peningkatan kinerja unit kerja dan penyamaan persepsi pengukuran kinerja.

## **D. MANFAAT PENGUKURAN KINERJA**

1. Menunjukkan kinerja yang telah dicapai melalui upaya-upaya (kebijakan, program dan kegiatan) yang telah dilakukan;
2. Dasar peningkatan kinerja yang direncanakan untuk tahun berikutnya;
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan Keputusan;
4. Sebagai alat komunikasi baik internal maupun eksternal;
5. Untuk mengidentifikasi kepuasan pemanfaatan pelayanan kepada *stake holders*.

## **BAB II**

### **PENGUKURAN KINERJA**

#### **A. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja.

#### **B. PRINSIP PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai Tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat Keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, hal penting yang harus dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja. Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja di setiap unit kerja yang mampu mengintegrasikan data kinerja dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja;
2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah diperjanjikan oleh pimpinan unit kerja;
3. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

### **C. TINGKAT PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilakukan pada tingkat Unit Eselon II, Eselon III dan IV. Ukuran keberhasilan unit Eselon II, III dan IV dalam menjalankan kegiatan diukur capaian kinerjanya pada level *output* dan *output* penting (hasil/*outcome*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

### **D. LANGKAH-LANGKAH PENGUKURAN KINERJA**

Dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja;
2. Membandingkan realisasi dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis.

### **E. TATA CARA MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA**

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat melakukan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

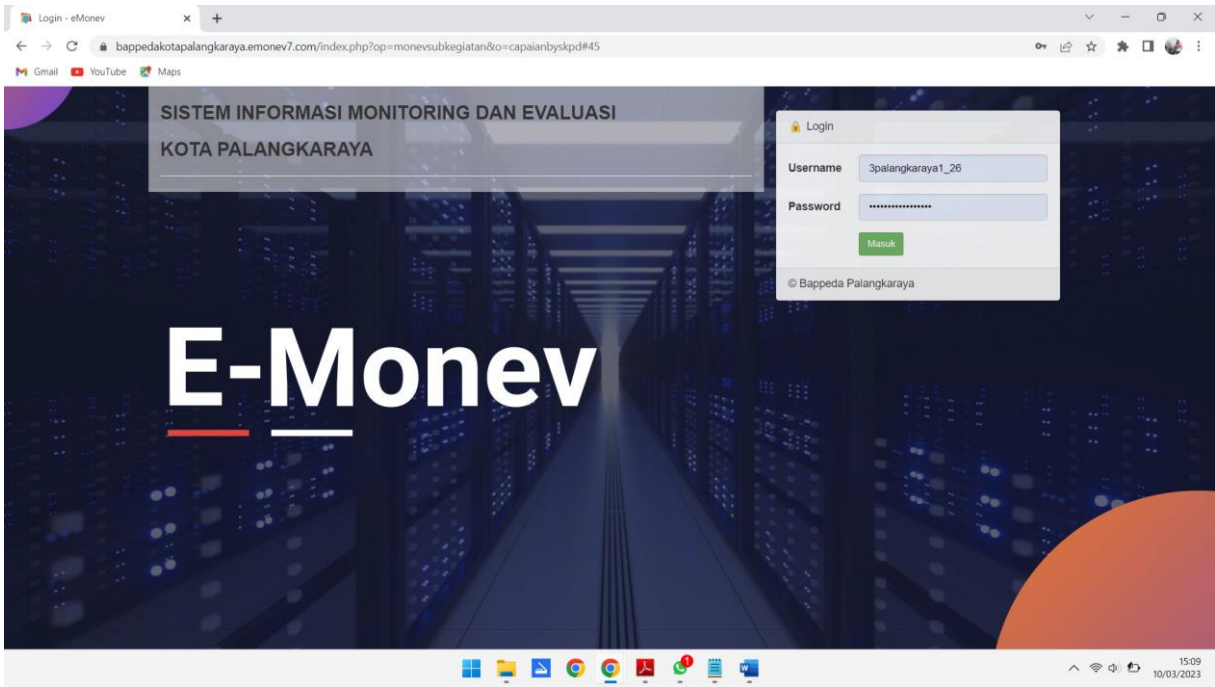
1. Pastikan status pada progress penyusunan Rencana Aksi "Renaksi telah ditandatangani" (Proses Renaksi telah selesai);
2. Pastikan data yang telah terinput pada rencana aksi sudah sesuai;
3. Pastikan unit kerja telah melakukan pengumpulan data kinerja sebelum menginputkan data pada aplikasi;
4. Memperhatikan timeline penginputan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan;
5. Penginputan capaian dilakukan secara triwulan, yakni realisasi target pada triwulan dimaksud, progress kegiatan/aktivitas yang sudah dilakukan, kendala/permasalahan serta strategi/tindak lanjut;
6. Penginputan capaian yang dilakukan pada menu kinerja hanya capaian terhadap Perjanjian Kinerja.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA PADA APLIKASI

Pengukuran kinerja terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan unit kerja dilakukan dengan memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (aplikasi E-Monev). Adapun tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja pada aplikasi E-Monev adalah sebagai berikut :

- 1. Login pada aplikasi E-Monev melalui link : <https://bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/>
- 2. Penginputan data kinerja dilakukan setiap triwulan 1, 2, 3 dan 4.



<

Capaian Indikator Program Renstra

palangkarayaPalangkaraya

bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/index.php?op=renstraprogram&o=capaianindikator

GmailYouTubeMaps

eMonevIMPACTOUTCOMEOUTPUT

Capaian Indikator Program Renstra  
Bappedalitbang

2019-2023Tampilkan

00.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator	Kondisi Awal	Tahun #1	Tahun #2	Tahun #3	Tahun #4	Tahun #5	Akhir RPMD
Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (N)	0	100	100	100	100	0	0

01.02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator	Kondisi Awal	Tahun #1	Tahun #2	Tahun #3	Tahun #4	Tahun #5	Akhir RPMD
Persentase Pelaksanaan RKPD-APED Ketetapan Pelaksanaan Waktu Implementasi (Persen)	0	46	48	50	75	0	0

01.03. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator	Kondisi Awal	Tahun #1	Tahun #2	Tahun #3	Tahun #4	Tahun #5	Akhir RPMD
Persentase Konsistensi Program RPMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	0	100	100	100	100	0	0

05.02. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Indikator	Kondisi Awal	Tahun #1	Tahun #2	Tahun #3	Tahun #4	Tahun #5	Akhir RPMD
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)	0	100	100	100	100	0	0

15:19  
10/03/2023

Rekapitulasi Indikator Sub-Kegiatan

palangkarayaPalangkaraya

bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/index.php?op=grafikata3&o=rekapindikator

GmailYouTubeMaps

eMonevIMPACTOUTCOMEOUTPUT

Rekapitulasi Indikator Sub-Kegiatan  
Bappedalitbang

Tahun  
2022Tampilkan

01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	Target	Real TW1	Real TW2	Real TW3	Real TW4
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	3	7	10	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	9	20	30	35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2	3	4	5

02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator	Target	Real TW1	Real TW2	Real TW3	Real TW4
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	3	6	9	12
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	3	6	9	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	0	1	2	3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	3	6	9	12

05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator	Target	Real TW1	Real TW2	Real TW3	Real TW4
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

15:28  
10/03/2023



05. Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (Orang) <small>Hasil Tn</small>	84	84	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang) <small>Hasil Tn</small>	22	4	8	3	7
06. Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Dan Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Dibeli (%) <small>Sampai Dengan Tn</small>	100	25	50	75	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibeli (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi luar daerah yang dihari (%) <small>Sampai Dengan Tn</small>	100	25	60	80	100
08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan jasa surat menyurat (%) <small>Sampai Dengan Tn</small>	100	25	50	85	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan (Rekening/Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang Dibeli dan Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12

09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Mesin Kantor yang di Pelihara (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara*) (unit) <small>Hasil Tn</small>	1	0	0	0	1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang Terpelihara, Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Bulan) <small>Sampai Dengan Tn</small>	12	3	6	9	12
02. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
01. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah (Dokumen) <small>Hasil Tn</small>	2	1	1	0	0
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah (Dokumen) <small>Hasil Tn</small>	6	0	2	2	2
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah (Dokumen) <small>Hasil Tn</small>	3	1	1	0	1
02. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi yang Diinput dalam Aplikasi E-Database dan SIPD dan Informasi Pembangunan yang Digunakan dalam Perencanaan Pembangunan (Laporan) <small>Hasil Tn</small>	3	1	1	0	1
Pembiinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Program yang Tersedia di Aplikasi Perencanaan (Laporan) <small>Hasil Tn</small>	1	0	0	1	0
03. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						
Indikator	Target	Real TW1	Real TW2	Real TW3	Real TW4	

❖ Pengukuran Indikator Kinerja Utama :

1. Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya dilakukan dengan formulasi  $\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan RPJMD}} \times 100\%$ .
2. Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya dilakukan dengan formulasi  $\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RENJA}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan RENSTRA}} \times 100\%$ .
3. Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya dilakukan dengan formulasi  $\frac{\text{Jumlah Program/ Kegiatan RENJA}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan DPA}} \times 100\%$ .
4. Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target  
(Mengawal Target Perjanjian Kinerja Walikota/Daerah)  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya dilakukan dengan formulasi  $\frac{\text{Capaian (Realisasi) Program/Kegiatan Perangkat Daerah}}{\text{Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah}}$ .
5. Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan  
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya dilakukan dengan formulasi  $\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan oleh perangkat teknis}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}}$ .

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya berperan dalam melakukan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kota Palangka Raya. Pengukuran Kinerja menjadi salah satu tahapan penting karena berfungsi sebagai dasar penentu nilai kinerja yang akan diperoleh unit eselon yang berada di lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

Pedoman pengukuran kinerja ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan pengukuran kinerja atas target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pedoman pengukuran kinerja ini diharapkan dapat membantu seluruh unit, sehingga penilaian SAKIP di lingkungan Bappedalitbang Kota Palangka Raya lebih berkualitas, transparan dan akuntabel.







Palangka Raya, 22 Januari 2024

Kepala Badan Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Kota Palangka Raya,



*[Signature]*  
**Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19750317 199903 1 005

**PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA**

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Tim	Sub. Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perhitungan data kinerja berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja masing-masing menurut IKU.				Data kinerja bidang-bidang	15 Menit	Pengumpulan data kinerja bidang	
2	Penyampaian data kepada sekteretaris untuk ditelaah keabsahan indikator yang bersangkutan sesuai dengan IKU.				Ceklist kelengkapan Data Kinerja	30 menit	Hasil telaah berupa kelengkapan ceklist	
3	Analisa untuk pengukuran data kinerja dari data yang telah ditelaah oleh sekretaris.				Hasil telaah berupa kelengkapan ceklist	1 Jam	Telaah Pengukuran Kinerja	
4	Penyempurnaan hasil analisa diserahkan kepada sekretaris.				Telaah Pengukuran Kinerja	15 Menit	Telaah Pengukuran Kinerja	
5	Hasil penyempurnaan diketik oleh Fungsional Perencana Sub Bagian Program				Telaah Pengukuran Kinerja	15 Menit	Telaah Pengukuran Kinerja	
6	Pendokumentasian dan penyimpanan hasil oleh Fungsional Perencana Sub Bagian Program sebagai bahan tindak lanjut dalam Pemantauan.				Hasil Pengumpulan Data kinerja	5 Menit	Dokumen Pengukuran Data kinerja	